

Mengungkap kekuatan retorika dalam pidato Presiden Prabowo Subianto “Singgung Tarif Trump” (Analisis wacana kritis Fairclough)

*Revealing the power of rhetoric in President Prabowo Subianto’s speech ‘Touching on Trump’s Tariff’
(Fairclough’s critical discourse analysis)*

Tri Indrayanti^{1,*}, Ani Rakhmawati², & Kundharu Saddhono³

¹Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Ngagel Dadi IIIB/37, Surabaya, Indonesia

^{2,3}Universitas Sebelas Maret

Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Indonesia

^{1,*}Email: indrayanti.trie18@unipasby.ac.id; Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-1368-3143>

²Email: anirakhmawati@staff.uns.ac.id; Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1516-1184>

³Email: kundharu_s@staff.uns.ac.id; Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8720-7343>

Article History

Received 23 June 2025

Revised 4 August 2025

Accepted 13 August 2025

Published 4 September 2025

Keywords

political speech; Fairclough’s critical discourse analysis; hegemony; national identity; ideology.

Kata Kunci

pidato politik, analisis wacana kritis Fairclough; hegemoni; identitas nasional; ideologi.

Read online

Scan this QR code with your smart phone or mobile device to read online.



Abstract

In the contemporary political landscape, state speeches are crucial areas for the manifestation of power and the formation of public opinion. This study aims to investigate how President Prabowo Subianto utilizes speech strategies in his speech alluding to the “Trump Tariff” and explores how political speeches are used to strengthen the legitimacy of power, build national identity, and manage power relations in the Indonesian socio-political context. The focus of the study is on identifying rhetorical elements that are strategically used to shape perceptions. The approach used in the critical approach is Fairclough’s Critical Discourse Analysis with a descriptive qualitative method. The analysis carried out includes various discursive elements such as legitimacy strategies, strengthening hegemony, forming collective identities, and the influence of discourse on the audience. The results of the study show that President Prabowo Subianto’s speech fulfills three elements of Fairclough’s dimensions. In addition to the three elements of Fairclough’s dimensions, researchers found uniqueness in President Prabowo’s speech, namely the strategy of using polarity, the use of discursive strategies, intertextuality and interdiscursivity, hegemony strategies and re-narratives of power, the construction of collective and national identities, discursive strategies in speeches, and the use of high-level narratives of legitimacy of power.

Abstrak

Dalam lanskap politik kontemporer, pidato kenegaraan merupakan platform krusial bagi perwujudan kekuasaan dan pembentukan opini publik. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan strategi naratif dalam pidatonya yang menyinggung “Tarif Trump” dan mengeksplorasi bagaimana pidato politik digunakan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan, membangun identitas nasional, dan mengelola relasi kekuasaan dalam konteks sosial-politik Indonesia. Penelitian ini berfokus pada identifikasi elemen retorika yang secara strategis digunakan untuk membentuk persepsi. Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan kritis ini adalah Analisis Wacana Kritis Fairclough dengan metode kualitatif deskriptif. Analisis ini mencakup berbagai elemen diskursif seperti strategi legitimasi, penguatan hegemoni, pembentukan identitas kolektif, dan pengaruh isi pidato terhadap masyarakat terkait kenaikan tarif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto memenuhi tiga dimensi yang dikemukakan Fairclough. Selain tiga elemen dimensi Fairclough, peneliti menemukan keunikan dalam pidato Presiden Prabowo, yaitu strategi penggunaan polaritas, penggunaan strategi diskursif, intertekstualitas dan interdiskursivitas, strategi hegemoni dan re-narasi kekuasaan, konstruksi identitas kolektif dan nasional, strategi diskursif dalam pidato, dan penggunaan narasi tingkat tinggi tentang legitimasi kekuasaan.

© 2025 The Author(s). Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya by Universitas Mulawarman

How to cite this article with APA style 7th ed.

Indrayanti, T., Rakhmawati, A., & Saddhono, K. (2025). Mengungkap kekuatan retorika dalam pidato Presiden Prabowo Subianto “Singgung Tarif Trump” (Analisis wacana kritis Fairclough). *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 8(3), 741—754. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v8i3.1360>



Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya
is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution-Share Alike
4.0 International License (CC BY-SA 4.0)



A. Pendahuluan

Bahasa dipahami sebagai sistem simbol yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan menyampaikan makna dalam interaksi sosial. Bahasa adalah sistem komunikasi yang kompleks dan fleksibel yang memungkinkan manusia untuk menyampaikan informasi, emosi, dan ide. Sistem simbol ini bersifat konvensional dan dipelajari dalam konteks sosial budaya tertentu (Crystal, 2015). Bahasa tidak hanya alat komunikasi semata, melainkan juga praktik sosial yang merefleksikan dan membentuk realitas sosial. Bahasa adalah praktik sosial yang secara simultan membentuk identitas, hubungan sosial, dan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam komunitas yang semakin beragam, bahasa memiliki fungsi penting dalam komunikasi antar budaya. Orang-orang memanfaatkan kumpulan bahasa yang fleksibel-menggabungkan kode, berganti bahasa, dan mengadopsi cara berbicara yang berbeda-untuk merundingkan identitas dan menjalin hubungan di tengah perbedaan (Rampton, 2023).

Menurut Lantolf & Poehner bahasa adalah sistem yang memiliki dimensi kognitif, sosial, dan budaya secara simultan (Lantolf & Poehner, 2018). Artinya, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai kode untuk mentransmisikan pesan, tetapi juga sebagai media refleksi pikiran, norma sosial, dan praktik budaya yang berkembang secara dinamis. Pendekatan multidimensional ini penting dalam studi linguistik kontemporer, terutama untuk memahami interaksi antara bahasa dan konteks sosial. Bahasa merupakan indikator utama dari identitas sosial. Keputusan linguistik yang kita ambil, baik dengan sengaja atau tidak, menyampaikan informasi mengenai siapa kita, asal usul kita, dan komunitas yang kita kenali. Perbedaan dalam bahasa mencerminkan tatanan sosial yang rumit (Fuller & Wardhaugh, 2021). Dalam hal ini, bahasa adalah medium yang dinamis dan selalu berproses dalam interaksi sosial.

Dari beberapa pengertian bahasa di atas, bisa disimpulkan bahasa merupakan sistem simbol kompleks yang tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai praktik sosial yang membentuk identitas, hubungan sosial, dan kekuasaan dalam masyarakat. Bahasa beroperasi secara multidimensional, mencakup aspek kognitif, sosial, dan budaya yang saling terkait dan terus berkembang secara dinamis. Selain itu, bahasa berperan sebagai agen perubahan sosial yang aktif dalam membentuk serta mereproduksi realitas budaya dan sosial.

Wacana merupakan salah satu kajian ilmu linguistik dan cabang dari kajian pragmatik. Wacana memiliki cakupan yang lebih luas dari klausa dan kalimat. Wacana memiliki gagasan dan konsep yang ada di dalam suatu teks. Kajian wacana di dalam Bahasa Inggris disebut *discourse* yang berarti ungkapan dalam interaksi komunikasi (Rohana & Syamsuddin, 2015). Apa yang dimaksud pembicara dan makna yang ingin disampaikan memiliki peran penting di dalam sebuah komunikasi. Walaupun kenyataannya tidak berjalan demikian.

Before looking more closely at ways in which encoded linguistic meaning falls short of determining the proposition expressed or ‘what is said’, there is another sort of case of the coming apart of speaker meaning and linguistic meaning which should be mentioned, if only to set it aside for the moment (Carston, 2002).

Pernyataan Carston (2002) mengacu pada konsep perbedaan antara makna linguistik yang terkandung dalam kata atau kalimat dan makna yang dimaksudkan oleh pembicara, yang sering kali dapat berbeda. Sebelum mendalami lebih lanjut bagaimana makna linguistik tidak selalu sepenuhnya menentukan proposisi yang disampaikan atau “apa yang dikatakan,” penting untuk menyebutkan kasus lain di mana terdapat pemisahan antara makna yang dimaksudkan oleh pembicara dan makna linguistik. Kasus ini perlu disebutkan meskipun nantinya akan disingkirkan sementara dalam pembahasan untuk fokus pada aspek lain dari hubungan antara bahasa dan makna.

Dalam analisis wacana kritis (AWK), teks memiliki peran yang tidak hanya memiliki fungsi bebas nilai dan mencerminkan apa yang dilihat. Namun, teks berusaha untuk mewarnai struktur sosial yang sengaja dibuat produsen teks. Wacana, yang merupakan salah satu cara penggunaan bahasa, adalah suatu tindakan sosial. Ia tidak hanya mencerminkan masyarakat, tetapi juga

berkontribusi dalam pembentukannya. Dengan melakukan analisis kritis terhadap wacana, kita dapat menemukan cara bahasa digunakan untuk mempertahankan, mempertanyakan, atau mengubah struktur kekuasaan dan gagasan (Fairclough, 2001). AWK berusaha untuk memahami wacana yang tidak hanya studi tentang bahasa, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks di sini memiliki pengertian adanya tindakan marginal individu atau kelompok tertentu dengan menggunakan kekuasaan dalam teks (wacana).

Pidato politik adalah alat komunikasi strategis yang digunakan dalam konteks kampanye untuk mengartikulasikan kebijakan, membangun citra kandidat, dan mengkonsolidasikan basis pemilih (Wijaya & Setiawan, 2021). Dalam konteks ini, pidato politik memiliki fungsi instrumental untuk memenangkan dukungan elektoral. Menurut Hartono (2019), pidato politik adalah komunikasi verbal yang digunakan oleh politisi untuk mempengaruhi opini publik, membangun legitimasi kekuasaan, dan mengartikulasikan visi politik mereka kepada masyarakat. Pidato ini berperan penting dalam membentuk persepsi dan menggalang dukungan politik melalui strategi retorika yang efektif. Pidato politik merupakan praktik wacana yang secara eksplisit dan implisit mengandung ideologi politik tertentu yang berfungsi mereproduksi atau menantang struktur kekuasaan yang ada (Susilo, 2020). Dengan demikian, pidato politik tidak hanya soal penyampaian pesan, tetapi juga arena perjuangan ideologis.

Sependapat dengan pendapat di atas, pidato politik berperan sebagai medium komunikasi yang memungkinkan politisi bernegosiasi dengan audiens mengenai makna sosial dan politik, sekaligus menciptakan narasi yang dapat memobilisasi dukungan (Prabowo, 2022). Pendekatan ini menyoroti aspek dialogis dan konstruktif pidato politik. Pidato politik adalah fenomena multimodal yang menggabungkan aspek verbal, non-verbal, dan kontekstual dalam penyampaian pesan politik (Amelia & Kartika, 2023). Mereka menekankan pentingnya analisis multimodal untuk memahami keseluruhan dampak pidato dalam konteks komunikasi politik modern. Analisis multimodal menggabungkan berbagai elemen komunikasi, seperti teks, gambar, suara, dan gestur, untuk memahami bagaimana pesan disampaikan dan diterima oleh audiens. Dalam konteks pidato politik, pendekatan ini membantu mengungkap dampak keseluruhan dari pesan yang disampaikan, termasuk bagaimana elemen non-verbal memperkuat atau mengubah makna dari kata-kata yang diucapkan.

Dari pendapat tentang Pidato politik di atas, bisa disimpulkan pidato politik merupakan alat komunikasi strategis yang berfungsi untuk mempengaruhi opini publik, membangun legitimasi kekuasaan, dan menyampaikan visi politik kepada masyarakat. Selain sebagai sarana persuasi, pidato politik juga merupakan praktik wacana yang mengandung ideologi dan berperan dalam mereproduksi atau menantang struktur kekuasaan yang ada. Dalam konteks modern, pidato politik bersifat multimodal, menggabungkan unsur verbal, non-verbal, dan konteks sosial untuk menciptakan narasi yang dapat memobilisasi dukungan politik.

Fairclough memperkenalkan pendekatan analisis wacana yang mengkaji bahasa sebagai praktik sosial yang terkait erat dengan ideologi dan kekuasaan. Fairclough (1997) menekankan pentingnya melihat teks tidak hanya dari segi linguistik, tetapi juga dalam konteks produksi, distribusi, dan konsumsi yang melibatkan hubungan sosial yang kompleks. Pendekatan ini mengintegrasikan tiga dimensi analisis, yakni analisis teks, praktik diskursus, dan praktik sosiokultural, sehingga memungkinkan pemahaman bagaimana wacana mereproduksi atau mengubah struktur sosial. Buku ini juga membahas bagaimana wacana dapat menjadi alat dominasi atau perlawanan melalui naturalisasi makna ideologis. Dengan demikian, analisis wacana kritis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif dan bertujuan mendukung praktik sosial yang lebih adil.

Fairclough mengembangkan konsep *orders of discourse*, yaitu sistem praktik diskursus yang terstruktur secara sosial dan historis, yang memengaruhi dan dibentuk oleh teks serta praktik produksi dan konsumsi wacana. Teori ini menggabungkan pemikiran Bakhtin tentang heteroglossia dan intertekstualitas, serta konsep hegemoni Gramsci yang menekankan bagaimana dominasi budaya dapat dipertahankan melalui wacana. Pendekatan tiga dimensi AWK mengharuskan analisis simultan pada (1) teks sebagai produk bahasa yang memiliki struktur dan

fungsi ideasional, interpersonal, dan tekstual, (2) praktik diskursus yang mencakup produksi dan interpretasi teks, serta (3) praktik sosiokultural yang lebih luas sebagai konteks sosial yang membentuk dan dibentuk oleh wacana. Seperti Fairclough menulis “*Power is conceptualized as the capacity to control discourse and to sustain particular discursive practices with ideological investments*” (Fairclough, 1996).

Penelitian ini akan mencoba memotret retorika yang disampaikan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto dalam konteks komunikasi politik terutama saat munculnya isu Tarif Trump. Di dalam ranah politik, seorang presiden tentunya mahir dalam beretorika terdapat kebijakan yang dibuatnya bersama pemerintahannya. Seorang kepala negara pun tentu memiliki daya tarik tersendiri sehingga mampu meyakinkan rakyatnya. *In political communication, language function holds a pivotal role in reflecting power dynamics* (Nicky et al., 2024). Melalui pernyataan itu, dalam komunikasi politik, fungsi bahasa memiliki peran sangat penting dalam mencerminkan dinamika kekuasaan. Seorang kepala negara pun secara langsung akan melakukan itu. Nicky juga menambahkan: “*In political endeavors, the ideal is that every instance of political communication offers politicians a platform to effectively convey their ideas and fosters an environment conducive to reciprocal discourse*” (Nicky et al., 2024).

Dalam dunia politik, setiap contoh komunikasi politik yang ideal akan selalu menawarkan platform bagi politisi untuk menyampaikan ide-ide mereka secara efektif dan menumbuhkan lingkungan yang mendukung wacana timbal balik. Jelas bahwa seorang kepala negara tentu akan selalu menciptakan “rasa tenang” rakyatnya melalui tuturan-tuturan dalam pidato yang disampaikan. Teks tutur yang dituturkan oleh orang-orang yang paling berpengaruh memiliki fungsi transaksional untuk menekankan isi permintaan maaf sebagai tindak tutur itu sendiri (Laili, 2024).

Isu penting dalam penelitian ini meliputi bagaimana Presiden Prabowo Subianto memframing masalah dan tantangan sosial yang dihadapi oleh negara di dunia menghadapi kenaikan nilai tukar uang. Penelitian akan menyoroti masalah yang dihadapi negara di dunia termasuk Indonesia sebagai akibat dari menurunnya nilai tukar mata uang dunia. Selain itu, penelitian ini akan menekankan pentingnya memahami bagaimana kepala negara Republik Indonesia menentukan definisi masalah dan pendekatan penyelesaiannya, khususnya bagaimana masyarakat harus menghadapi permasalahan yang ada. Terakhir, penelitian ini juga akan mengkaji keseimbangan antara masalah dunia dengan negara yang dipimpin presiden sebagai akibat pernyataan presiden AS, dan menemukan bahwa presiden dalam tuturan yang diungkapkan terdapat tuturan “penenang” untuk masyarakat.

Penelitian terdahulu tentang analisis wacana kritis tentang analisis framing masalah sosial dan representasi isu-isu tertentu dalam pidato Presiden Barack Obama yaitu penelitian Penekanan pada analisis framing personal/individu dan struktural/institusional dalam teks pidato (McDougal, 2013). Latar penelitian ini berakar dari paradigma perbedaan budaya dan analisis framing yang menyoroti bagaimana persepsi dan representasi isu sosial dibentuk melalui pidato politik Presiden Barack Obama. Penelitian ini fokus pada bagaimana isu-isu yang dihadapi komunitas Afrika-Amerika dan kelompok lain dipresentasikan melalui framing struktural/institusional dan personal/individu dalam pidato-pidato Presiden Barack Obama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan keduanya sama-sama menganalisis analisis wacana kritis. Perbedaan kedua penelitian, penelitian terdahulu menggunakan teori Van Dick, sedangkan penelitian saat ini teori Fairclough.

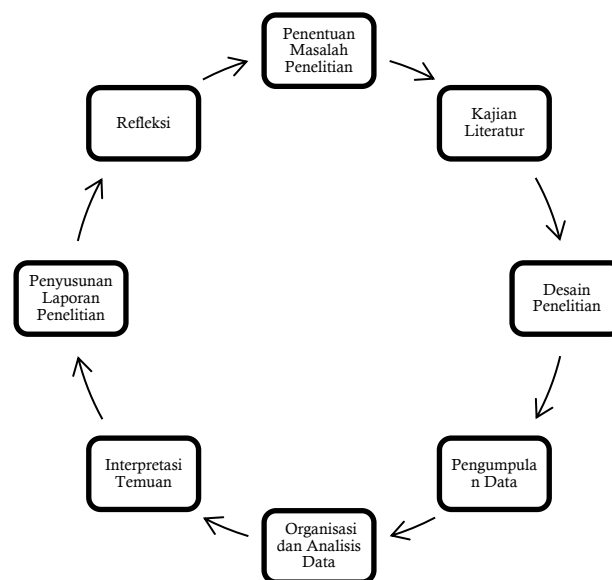
Penelitian terdahulu kedua memaparkan LGBT dalam perspektif pemberitaan media daring Tempo.com dan Republika.com (Mahardika, 2024). Penelitian ini menunjukkan bahwa media tidak bersikap netral, melainkan membangun realitas sosial melalui pilihan bahasa dan framing yang mencerminkan ideologi berbeda dalam memandang LGBT. Tempo cenderung menggunakan pendekatan moderat dan hak asasi manusia, sementara Republika mengadopsi perspektif konservatif berbasis agama. Persamaan penelitian ini sama-sama menganalisis analisis wacana kritis. Perbedaan kedua penelitian, penelitian terdahulu menggunakan teori Roger Fowler, sedangkan penelitian saat ini dengan menggunakan teori Fairclough.

Teknik analisis wacana kritis yang populer di antaranya Sara Mills, Fowler, Foucauld, Van Dijk, dan Fairclough. Penelitian merujuk pada analisis wacana kritis pemikiran Fairclough. Mirip yang diungkapkan Van Dijk, analisis AWK Norman Fairclough menekankan pada teks mikro dengan konteks yang ada di masyarakat makro. Model analisis ini memiliki kontribusi dalam analisis sosial, sehingga mampu menarik benang merah antara analisis tekstual (yang melihat bahasa bersifat tertutup) dengan konteks masyarakat luas. Poin penting yang dinyatakan Fairclough yakni mengamati bahasa sebagai praktik sosial; menekankan pada pembentukan bahasa, relasi sosial, dan konteks sosial tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi retorika linguistik (pilihan kata, struktur kalimat, metafora, dan sebagainya) dalam pidato Presiden Prabowo Subianto “Singgung Tarif Trump” mewujudkan kekuasaan dan dominasi.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif ini dapat menghasilkan data-data deskriptif berupa kata yang berasal dari tuturan lisan tentang sifat individu, keadaan, dan gejala dari kelompok yang diamati (Rahman, 2024). Metode yang digunakan adalah analisis wacana terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto yang secara langsung merujuk negara-negara berkembang di dunia, sekaligus untuk mengungkap pesan tersembunyi dan terlihat dalam komunikasi politiknya. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kritis. Pendekatan kritis dikatakan sebagai pendekatan untuk mengungkap fenomena yang terdapat di dalam pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Data dalam penelitian berupa kata, klausa, dan kalimat pada tuturan pidato Presiden Prabowo Subianto, sedangkan sumber data berupa tuturan pidato Presiden Prabowo Subianto yang diambil dari Youtube (Kompas.com, 2025). Teknik pengumpulan data menggunakan bagan alir pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Alir Analisis Data Penelitian

Bagam pada Gambar 1 menggambarkan alur metode penelitian kualitatif deskriptif menurut Creswell (2014). Penjelasannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif Menurut Creswell

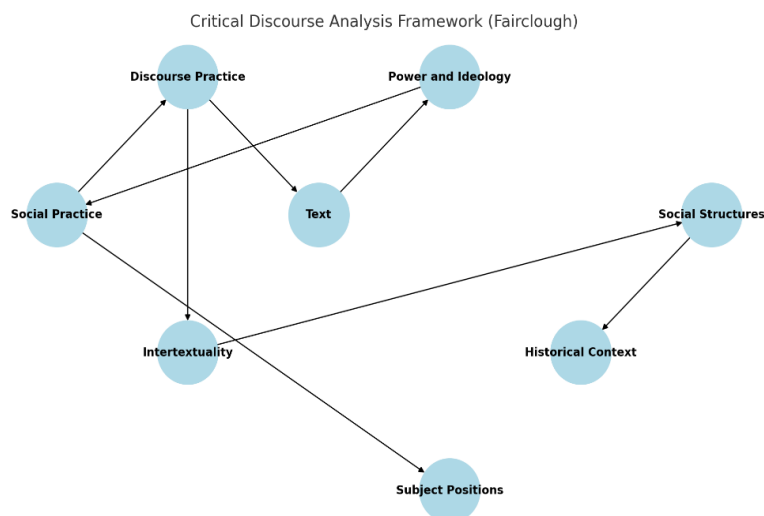
No	Tahap	Penjelasan
1	Penentuan Masalah Penelitian	Peneliti menggali topik yang relevan, dan menetapkan pertanyaan penelitian yang bersifat eksploratif dan terbuka, bukan terfokus pada variabel atau hubungan sebab-akibat.
2	Kajian Literatur	Pelibatan pencarian literatur yang relevan untuk memberikan gambaran konteks dan kerangka teoretis tentang topik yang diteliti.
3	Desain Penelitian	Peneliti merancang metode pengumpulan data yang sesuai dengan menentukan objek yang relevan.
4	Pengumpulan Data	Peneliti mengumpulkan data melalui studi dokumentasi.
5	Organisasi dan Analisis Data	Peneliti mengategorikan data dan mencari pola atau tema yang muncul untuk memahami fenomena secara menyeluruh.
6	Interpretasi Temuan	Peneliti menginterpretasikan temuan yang didapatkan, mengaitkan dengan teori dan literatur, serta menarik simpulan tentang fenomena yang diteliti.
7	Penyusunan Laporan Penelitian	Peneliti menyajikan kutipan-kutipan langsung dari data untuk mendukung temuan yang ada, serta membahas relevansi temuan dengan literatur yang ada
8	Refleksi	Peneliti melakukan refleksi dan mengevaluasi kekuatan dan keterbatasan dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

C. Pembahasan

Kerangka utama dari analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough, dengan fokus pada hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam konteks sosial. Titik pusatnya adalah analisis wacana kritis sebagai metode analisis bahasa yang menelaah teks, praktik diskursus, dan praktik sosiokultural secara simultan untuk memahami bagaimana wacana memengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur sosial.

Peta konsep terbagi menjadi tiga dimensi utama: (1) dimensi teks, yakni mempelajari struktur bahasa, termasuk unsur leksikal, gramatikal, dan fungsi teks secara ideasional, interpersonal, serta tekstual; (2) dimensi praktik wacana/diskursus, yakni fokus pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks, serta bagaimana wacana dibentuk oleh dan membentuk *orders of discourse* (tatanan diskursus sosial); dan (3) dimensi praktik sosiokultural, yakni konteks sosial yang meliputi kekuasaan, hegemoni, dan dinamika ideologi yang muncul melalui wacana, serta bagaimana wacana tersebut mereproduksi atau menantang dominasi sosial.

Seluruh dimensi ini saling terkait dan menjadi dasar untuk analisis kritis terhadap berbagai fenomena sosial, seperti media, pendidikan, dan politik, dengan tujuan meningkatkan kesadaran kritis bahasa (*critical language awareness*) dan mendukung transformasi sosial yang lebih adil. Gambar 2 merupakan gambaran penelitiannya.

**Gambar 2. Kerangka Utama Analisis Wacana Kritis yang Dikembangkan Fairclough**

Mengungkap kekuatan retorika dalam pidato Presiden Prabowo Subianto “Singgung Tarif Trump” (Analisis wacana kritis Fairclough)

Berikut akan diuraikan penjelasan model tiga dimensi Fairclough meliputi dimensi teks, dimensi praktik wacana, dan dimensi praktik sosiokultural (Fairclough, 1996) yang ada di dalam pidato yang disampaikan Presiden Subianto.

1. Dimensi Teks (*Textual Analysis*)

Pada dimensi teks, pidato ini menggunakan beragam elemen linguistik yang memperkuat pesan politik dan ideologi yang disampaikan. Fokus pada struktur bahasa, pilihan kata, metafora, dan gaya retorika (Muffidah et al., 2021). Unsur tertuang dalam data di bawah ini.

Penggunaan repetisi afirmatif	<i>“Kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah berlutut, kita tidak akan pernah mengemis...”</i> (0.31), (29.44)
-------------------------------	---

Pidato ini secara berulang menekankan pernyataan di atas, yang berfungsi untuk membangkitkan semangat kolektif dan ketahanan nasional. Repetisi ini menekankan posisi yang kuat dan tak tergoyahkan dalam menghadapi tantangan, sekaligus menggambarkan semangat nasionalisme yang teguh.

Penggunaan metafora perjuangan	<i>“berdiri di atas kaki sendiri”</i> (0.22) <i>“tidak perlu dikasihani”</i> (0.31) <i>“perang lawan sampah”</i> (32.19)
--------------------------------	--

Dalam banyak bagian pidato kata-kata di atas digunakan untuk menekankan pentingnya kemandirian bangsa. Metafora ini menggambarkan negara yang kuat dan tidak bergantung pada pihak lain, menggambarkan Indonesia sebagai negara yang berdaya dan siap menghadapi tantangan internasional tanpa rasa takut.

Intertekstualitas religius dan budaya	<i>“Bismillahirrahmanirrahim”</i> (1.01) <i>“Tuhan Maha Kuasa”</i> (3.51)
---------------------------------------	--

Pidato ini mengandung unsur religius yang kuat, terlihat dari penggunaan ungkapan seperti *“Bismillahirrahmanirrahim”* dan *“Tuhan Maha Kuasa”*. Dengan menyertakan elemen-elemen agama, pidato ini berusaha menghubungkan pesan politik dengan legitimasi moral yang bersifat universal dan diterima secara luas oleh audiens yang beragam secara religius.

Pemilihan Kata yang Menggugah Emosi	<i>“kita tidak perlu dikasihani, bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani”</i> (29.44)
-------------------------------------	---

Kalimat-kalimat tersebut menggugah perasaan audiens dengan menyampaikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdiri dengan kekuatannya sendiri dan tidak membutuhkan belas kasihan dari pihak mana pun. Ini adalah strategi retorik yang membangkitkan rasa bangga dan martabat nasional (Mardikantoro et al., 2019).

Diksi nasionalistik dan kolektif	<i>“kita”</i> = <i>inclusive pronoun</i> (28.57) (29.14) (29.21) (29.28) (29.44) (30.20), dll
----------------------------------	---

Kata *“kita”* mendominasi sebagai bentuk *inclusive pronoun* yang menandakan solidaritas dan penyatuan identitas rakyat dan negara.

2. Dimensi Praktik Wacana (*Discursive Practice*)

Pada dimensi praktik wacana, analisis berfokus pada bagaimana pidato ini diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh audiens. Fokus pada bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi, di dalam pidato tersebut.

Produksi teks	Pidato diproduksi dalam konteks acara publik resmi oleh seorang kepala negara.
---------------	--

Pidato ini diproduksi dalam konteks acara publik resmi oleh seorang kepala negara, yang memberikan pesan langsung kepada rakyat dan pihak-pihak terkait. Sebagai bagian dari pemerintahan, pidato ini bertujuan untuk menguatkan posisi politik dan memberikan arahan kepada masyarakat.

Distribusi Teks	Pidato disampaikan secara langsung kepada audiens di tempat umum dan dibagikan ke kanal youtube atau media sosial yang lain.
-----------------	--

Pidato ini tidak hanya disampaikan secara langsung kepada audiens di tempat, tetapi juga didistribusikan melalui berbagai saluran media massa, termasuk televisi, radio, dan media sosial. Hal ini memperluas jangkauan pesan kepada khalayak yang lebih besar, dari elit politik hingga masyarakat umum. Proses distribusi ini menunjukkan bagaimana teks politik dapat mempengaruhi opini publik di berbagai lapisan masyarakat (Ummah, 2019).

Konsumsi Teks	Audiens pidato ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk pejabat pemerintah, tokoh agama, masyarakat, dan media.
---------------	---

Audiens pidato ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk pejabat pemerintah, tokoh agama, masyarakat, dan media. Pesan politik dalam pidato ini dikonsumsi dalam berbagai konteks, dari masyarakat yang lebih luas hingga elite politik yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan (Mudiawati et al., 2023).

3. Dimensi Praktik Sosiokultural (*Sociocultural Practice*)

Dimensi praktik sosial menganalisis bagaimana pidato ini berfungsi dalam konteks sosial yang lebih luas, memperhatikan hubungan kuasa dan ideologi yang ada. Fokus pada konteks sosial dan ideologi yang melatarbelakangi

Legitimasi Kekuasaan	<i>"Kita akan swasembada pangan, kita akan menjadi lumbung pangan dunia"</i> (30.20)
----------------------	--

Pidato ini berfungsi untuk memperkuat posisi pemimpin dengan menciptakan citra diri sebagai pahlawan rakyat yang bekerja untuk kepentingan nasional. Kalimat seperti *"Kita akan swasembada pangan, kita akan menjadi lumbung pangan dunia"* menciptakan gambaran bahwa pemerintah sedang berjuang untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa.

Hegemoni Nasionalisme Populis	<i>"Kita tidak akan pernah menyerah"</i> dan <i>"kita akan berdiri di atas kaki sendiri"</i> (29,45)
-------------------------------	--

Pidato ini berfokus pada hegemoni nasionalisme populis, di mana pesan yang disampaikan lebih menekankan pada identitas kolektif bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri dan tangguh. Dengan menyebutkan *"Kita tidak akan pernah menyerah"* dan *"kita akan berdiri di atas kaki sendiri"*, pidato ini mengusung narasi keberhasilan dan ketahanan nasional yang mandiri.

Mengungkap kekuatan retorika dalam pidato Presiden Prabowo Subianto “Singgung Tarif Trump” (Analisis wacana kritis Fairclough)

Membangun Narasi Solidaritas Kolektif	<i>“kerja, kerja, kerja”</i> (31.13) <i>“Bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani”</i> (0.31)
---------------------------------------	---

Pidato ini juga mengandung kritik terhadap kelompok elit yang dianggap tidak memahami realitas rakyat. Misalnya, ungkapan “elit-elit yang pintar-pintar tapi lupa dengan hal-hal yang paling dasar” memperlihatkan upaya delegitimasi terhadap kelompok tertentu yang dianggap tidak peduli dengan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini menciptakan dikotomi antara pemimpin yang bekerja untuk rakyat dan elit yang dianggap tidak memperhatikan kepentingan rakyat (Indayani & Izzal, 2023).

Kritik terhadap Elite	ungkapan <i>“elit-elit yang pintar-pintar tapi lupa dengan hal-hal yang paling dasar”</i> (7.58)
-----------------------	--

Dengan penggunaan *“kerja, kerja, kerja”* dan *“Bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani”*, pidato ini menekankan solidaritas dan kerja kolektif, memosisikan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menghadapi tantangan ekonomi dan sosial.

Selain ditemukan tiga dimensi dari Fairclough, di dalam penganalisisan penelitian juga ditemukan beberapa hal menarik, sebagai berikut.

4. Strategi Penggunaan Polaritas: “Kita” vs “Mereka”

Pidato ini sangat mengandalkan strategi polaritas antara “kita” dan “mereka,” yang digunakan untuk mengukuhkan identitas kolektif dan memisahkan pihak yang mendukung dari pihak yang dianggap sebagai lawan politik.

<i>“Kita”</i> sebagai Identitas Kolektif	<i>“kita sebagai insan yang bertakwa..”</i> (3.51) <i>“Kita bersyukur atas segala karunia..”</i> (4.12) <i>“kita tidak boleh menyerah..”</i> (10.21) <i>“kita cari solusi..”</i> (10.21) Hari ini saya sangat gembira melihat bahwa <i>kita</i> sekarang membuktikan 8.41 <i>kita</i> mengerti ini yang sedang kita kerjakan (34.42)
--	---

Frasa “kita” digunakan secara dominan untuk menunjukkan kekuatan kolektif bangsa, menciptakan rasa solidaritas di antara seluruh elemen masyarakat Indonesia.

<i>“Mereka”</i> sebagai Lawan atau Pihak Luar:	<i>“kecuali mereka yang sudah mapan..”</i> (23.08) <i>“Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada..”</i> (29.35) <i>“..kirim beras ke mereka..”</i> (11.42) (11.54) <i>“Pemimpin-pemimpin yang mikirkan lahan yang sulit mereka jaga sumber air yang sulit mereka jaga”</i> (21.24)
--	---

Pada beberapa bagian, seperti ketika menyebutkan negara-negara yang tidak mendukung Indonesia atau kelompok elit yang tidak peduli dengan rakyat (Wu et al., 2023), pidato ini menciptakan oposisi antara bangsa Indonesia yang kuat dan negara atau kelompok yang dianggap tidak berpihak pada rakyat (Noverino, 2015).

5. Strategi Diskursif dalam Pidato

Pidato ini menggunakan beberapa strategi diskursif yang kuat untuk memperkuat posisi politik dan meningkatkan legitimasi pemerintahan. Pidato ini memanfaatkan berbagai teknik retorik,

seperti penggunaan bahasa yang tegas, pengulangan, dan pernyataan yang emosional untuk mempengaruhi audiens dan membentuk opini publik yang mendukung kebijakan pemerintah. Selain itu, strategi diskursif ini juga bertujuan untuk memperkuat kredibilitas pemimpin dengan menonjolkan nilai-nilai positif dan menciptakan persepsi yang menguntungkan terhadap pemerintahannya (Addae et al., 2022).

Kontradiksi wacana terdapat di satu sisi, pidato ini mendorong kemandirian dan keberanian nasional dengan menyatakan "*kita tidak akan mengemis*," namun di sisi lain, terdapat kebijakan untuk tetap melakukan negosiasi dengan negara-negara besar, seperti dengan menyebutkan "*kita akan berunding*." Hal ini bisa dilihat sebagai wacana kontradiktif, di mana pemimpin mengajukan dualitas yang menyeimbangkan antara agresivitas ekonomi dan realisme politik (Sari, 2020).

Penyusunan ulang wacana politik internasional, adanya kalimat seperti "*kita akan menjadi lumbung pangan dunia*" dan "*kita bisa membantu negara lain*," pidato ini menggambarkan Indonesia sebagai negara yang kuat dalam kemandirian pangan dan memberi kontribusi internasional. Hal ini adalah upaya untuk mereposisi Indonesia di kancah dunia dengan membangun citra kekuatan baru yang tidak hanya menerima bantuan tetapi juga memberi bantuan (Kakisina et al., 2022). Wacana politik berfungsi sebagai alat untuk mereproduksi atau mengubah relasi kekuasaan melalui penggunaan bahasa yang membingkai ulang pemahaman publik terhadap dunia dan aktor sosialnya (Fairclough, 1996).

6. Intertekstualitas dan Interdiskursivitas

Pidato ini menunjukkan intertekstualitas kuat dengan berbagai wacana sosial dan budaya. Nilai religiusitas dan pluralisme terdapat di dalam pembukaan pidato menyapa semua agama secara eksplisit (*Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu*). Hal ini menunjukkan penggunaan intertekstualitas religius sebagai strategi legitimasi moral sekaligus simbol politik integratif. Di dalam pidato juga terdapat wacana sejarah perjuangan, terdapat di dalam kalimat:

"kita adalah bangsa pejuang" (33:59)

"semangat juang dan gotong royong" (34:14)

Kedua kalimat di atas merujuk pada narasi sejarah nasional. Ini membangun kesinambungan ideologis antara masa lalu (kemerdekaan) dan masa kini (pembangunan). Wacana pembangunan dan ekonomi kerakyatan muncul dalam penggunaan istilah seperti:

"pupuk organik", (32:02)

"kopi dari petani", (33:79)

"kredit untuk UMKM", (33:80)

"koperasi petani" (33:53)

Pernyataan di atas menunjukkan interdiskursivitas dengan wacana pembangunan inklusif dan pertanian berkelanjutan. *Intertextuality is a key mechanism by which texts draw on and transform existing discourses to produce new ideological effects* (Fairclough, 1996), jadi intertekstualitas dikatakan sebagai mekanisme kunci yang digunakan teks untuk mengambil dan mengubah wacana yang ada untuk menghasilkan efek ideologis baru (Noverino, 2015).

7. Strategi Hegemoni dan Re-narasi Kekuasaan

Pidato ini yang disampaikan Prabowo Subianto berfungsi membangun hegemoni baru dengan tiga strategi utama. Pidato yang disampaikan oleh Prabowo Subianto berfungsi untuk membangun hegemoni baru dengan menggerakkan audiens melalui tiga strategi utama, yaitu penguatan identitas politik, framing isu-isu nasional, dan penggunaan retorika yang mengaitkan kekuatan pemerintahan dengan kesejahteraan rakyat. Melalui strategi-strategi ini, Prabowo berusaha

menciptakan narasi yang mendominasi wacana politik, sekaligus memperkuat posisi kekuasaannya dalam pandangan publik. Tiga strategi utama tersebut, sebagai berikut. Re-narasi diartikan “penceritaan ulang” atau “menceritakan kembali.” Ini adalah proses menceritakan sebuah kisah, peristiwa, atau narasi yang sudah ada dengan cara yang baru atau berbeda. Berikut urainnya.

- a. *Naturalization of Power*, pengulangan kata:

“kerja, kerja, kerja” (31:13)

“pembangunan infrastruktur” (30:30)

Kedua kalimat ini dinarasikan sebagai kewajaran dan keniscayaan, bukan agenda ideologis. Ini adalah bentuk naturalisasi kekuasaan dalam bahasa Fairclough.

- b. *Personalization of Leadership*, yakni penekanan pada pengalaman pribadi presiden yang blusukan ke desa-desa dan pasar adalah bentuk strategi *personalization* yang memperkuat kedekatan simbolik antara pemimpin dan rakyat.

- c. Delegitimasi lawan, muncul dalam ungkapan seperti

“jangan jadi pengecut” (35:36)

“tidak perlu bermental kalah” (35:42)

Kedua kalimat di atas secara implisit membentuk oposisi antara kelompok nasionalis-aktif vs kelompok pasif-pengecut.

Hegemonic discourse works by positioning subjects in ways that reproduce existing power relations (Fairclough, 1996), bahwa wacana hegemoni bekerja dengan memposisikan subjek dalam cara yang mereproduksi hubungan kekuasaan yang ada (Wahyudi, 2021).

8. Konstruksi Identitas Kolektif dan Nasional

Identitas nasional dibangun melalui oposisi biner dan metafora mobilisasi. Penggunaan kata ganti yang digunakan di dalam pidato Presiden Negara Indonesia, sebagai berikut.

- Kita vs Mereka: “Kita” digunakan sebagai pronomina dominan untuk menciptakan identitas kolektif, sedangkan pihak luar (asing, pihak pasif) dikesankan sebagai “mereka” yang tidak sejalan dengan semangat bangsa.
- Bangsa pekerja vs bangsa konsumen: Perlawanan terhadap “bangsa pengimpor” dan glorifikasi “bangsa penghasil” mengonstruksi identitas ekonomi baru yang mandiri.
- Metafora gerak dan transformasi, seperti “bergerak”, “melompat”, “berubah”, digunakan secara strategis untuk menunjukkan progres, dinamika, dan modernitas.

Identitas nasional dibangun dengan menciptakan oposisi biner, seperti perbedaan antara “kita” dan “mereka,” yang menggambarkan kesatuan dan perbedaan kelompok tertentu, serta menggunakan metafora mobilisasi untuk menggugah semangat kolektif dan partisipasi masyarakat dalam perjuangan bersama demi mencapai tujuan bersama. Melalui pendekatan ini, identitas nasional tidak hanya ditekankan pada kesatuan, tetapi juga pada dinamika perbedaan yang membentuk solidaritas dalam konteks yang lebih luas (Jannah, 2013).

9. Strategi Diskursif dalam Pidato

Pidato yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menggunakan beberapa strategi diskursif yang kuat untuk memperkuat posisi politik dan meningkatkan legitimasi pemerintahan, sebagai berikut.

- a. Kontradiksi wacana: Di satu sisi, pidato ini mendorong kemandirian dan keberanian nasional dengan menyatakan *"kita tidak akan mengemis,"* namun di sisi lain, terdapat kebijakan untuk tetap melakukan negosiasi dengan negara-negara besar, seperti dengan menyebutkan *"kita akan berunding."* Hal ini bisa dilihat sebagai wacana kontradiktif, di mana pemimpin mengajukan dualitas yang menyeimbangkan antara agresivitas ekonomi dan realisme politik.
- b. Penyusunan ulang wacana politik internasional, adanya kalimat seperti *"kita akan menjadi lumbung pangan dunia"* dan *"kita bisa membantu negara lain,"*, pidato ini menggambarkan Indonesia sebagai negara yang kuat dalam kemandirian pangan dan memberi kontribusi internasional. Hal ini adalah upaya untuk mereposisi Indonesia di kancah dunia dengan membangun citra kekuatan baru yang tidak hanya menerima bantuan tetapi juga memberi bantuan.

Wacana politik berfungsi sebagai alat untuk mereproduksi atau mengubah relasi kekuasaan melalui penggunaan bahasa yang membingkai ulang pemahaman publik terhadap dunia dan aktor sosialnya (Fairclough, 1996). Wacana politik berperan penting dalam membentuk dan mempengaruhi struktur kekuasaan dengan cara menyusun ulang cara pandang masyarakat terhadap isu-isu sosial, politik, dan ekonomi melalui pemilihan kata, framing, dan narasi yang digunakan oleh aktor politik. Dengan demikian, bahasa dalam wacana politik bukan hanya mencerminkan realitas, tetapi juga dapat mengubah pemahaman publik mengenai aktor-aktor sosial dan posisi mereka dalam hubungan kekuasaan, baik untuk memperkuat maupun menantang status (Samsuri et al., 2022).

10. Penyusunan Narasi Legitimasi Kekuasaan

Pidato ini memiliki beberapa lapisan yang bertujuan untuk memperkuat legitimasi politik dan sosial. Pidato ini dirancang dengan berbagai lapisan retorik yang saling melengkapi, seperti penguatan identitas kolektif, penggambaran ancaman eksternal atau internal, serta penekanan pada prestasi pemerintah, yang kesemuanya bertujuan untuk memperkuat legitimasi politik pemimpin dan membangun dukungan sosial (Irawan, 2015). Melalui lapisan-lapisan tersebut, pidato ini tidak hanya berfokus pada isu-isu praktis, tetapi juga berusaha mempengaruhi persepsi publik terhadap kekuatan dan keberlanjutan pemerintahan yang ada (Wahyudi, 2021). Data yang dimaksud sebagai berikut.

Penggunaan legitimasi moral dan religius tampak dalam penggunaan frasa seperti:

"Bismillahirrahmanirrahim" (1:01)

"Tuhan Maha Kuasa" (3:51)

"puji syukur" (1:15) (7:20)

Pidato ini menciptakan legitimasi moral, menjadikan dirinya tidak hanya sebagai pernyataan politik tetapi juga sebagai aktivitas yang penuh berkah dan dilandasi keyakinan agama (Wahyudi, 2021). Penciptaan identitas *"pahlawan rakyat"*, pidato ini secara eksplisit membangun citra pemimpin sebagai pahlawan yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat, menggambarkan dirinya sebagai orang yang datang dari rakyat, bekerja untuk rakyat, dan tidak mendengarkan kritik yang tidak membangun. Seperti ungkapan seperti *"kita akan terus berjuang dan tidak akan pernah menyerah"* berfungsi untuk memperkuat citra dirinya sebagai pejuang yang tidak kenal lelah demi rakyat. Narasi legitimasi dalam pidato politik digunakan untuk memperkuat wacana dominan dan mengendalikan persepsi publik terhadap pemerintahan (Fairclough, 1996).

D. Penutup

Melalui analisis wacana kritis dengan pendekatan Norman Fairclough, dapat disimpulkan bahwa pidato politik ini berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan, pembangun identitas nasional, dan penguat wacana hegemoni yang mengutamakan kemandirian ekonomi dan sosial bangsa Indonesia. Melalui penggunaan metafora, strategi polaritas, dan pengulangan frasa yang menekankan kekuatan kolektif, pidato ini tidak hanya menyampaikan kebijakan politik, tetapi juga berperan dalam memperkuat ideologi nasionalisme dan memobilisasi audiens untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan negara. Dalam konteks sosial, pidato ini berfungsi untuk mengukuhkan struktur kekuasaan pemerintah dan menegaskan posisi Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, kuat, dan tidak bergantung pada pihak luar. Dalam penerapan AWK Fairclough pada penelitian ini, diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan kompleks antara bahasa, kekuasaan, dan praktik sosial dalam pidato Presiden Prabowo Subianto “Singgung Tarif Trump.”

Daftar Pustaka

- Addae, D., & Abakah, E. (2024). Discursive strategies of ideological representations in political speeches: A critical discourse analysis of selected speeches of Kwame Nkrumah. *European Journal of Literature, Language and Linguistics Studies*, 6(2), 141–162. <https://doi.org/10.46827/ejll.v6i2.396>
- Amelia, F., & Kartika, S. (2023). *Analisis multimodal pidato politik*. UB Press.
- Carston, R. (2002). *Thoughts and utterances*. Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9780470754603>
- Crystal, D. (2015). *Language is a complex and flexible system of communication enabling humans to convey information, emotions, and ideas*. Cambridge University Press.
- Fairclough, N. (1996). Discourse contributes to the shaping of social identities, social relations, and systems of knowledge and belief. In *Critical discourse analysis: The critical analysis of language* (pp. 57–98). Longman.
- Fairclough, N. (2001). *Language and power*. Pearson Education Ltd.
- Fuller, J. M., & Wardhaugh, R. (2021). *An introduction to sociolinguistics* (8th ed.). Wiley Blackwell.
- Indayani, I., & Izzal, F. (2023). Praktik sosial Norman Fairclough dalam kumpulan cerpen *Lelucon Para Koruptor* karya Agus Noor. *Pena Literasi*, 6(1), 92. <https://doi.org/10.24853/pl.6.1.92-100>
- Irawan, Y. (2015). Legitimasi kekuasaan dalam karya sastra Babad: Mimikri, hibriditas, dan ambivalensi dalam *Babad Pakualaman*. *JUMANTARA: Jurnal Manuskrip Nusantara*, 6(2), 157–172.
- Jannah, A. S. (2013). Konstruksi identitas kolektif perempuan gerakan salafi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 5(2), 41–54.
- Kakisina, P. A., Indhiarti, T. R., & Al Fajri, M. S. (2022). Discursive strategies of manipulation in COVID-19 political discourse: The case of Donald Trump and Jair Bolsonaro. *SAGE Open*, 12(1). <https://doi.org/10.1177/21582440221079884>
- Kompas.com. (2025, 23 Juli). *Pidato Prabowo singgung tarif Trump: Kita tak akan pernah berlutut!*
- Laili, E. N., S. P. (2024). Menyelesaikan konflik rasisme Kanada melalui hegemoni permohonan maaf Paus: Perspektif analisis wacana kritis. *Jurnal Ilmiah*, 13(2), 486–501.
- Lantolf, J. P., & Poehner, M. E. (2018). *Sociocultural theory and the pedagogical imperative in L2 education*. Routledge.
- Mahardika, R. Y. (2024). LGBT dalam perspektif Tempo.com dan Republika.com. *Jurnal Analisis Wacana*, 13, 396–411.

- Mair, C., & Fairclough, N. (1997). Critical discourse analysis: The critical analysis of language. *Language*, 73(1). <https://doi.org/10.2307/416612>
- Mardikantoro, H. B., Siroj, M. B., & Utami, E. S. (2019). Wacana berita korupsi di surat kabar: Kajian analisis wacana kritis Van Dijk dalam dimensi praktik sosial. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES*, 638–642.
- McDougal, S. (2013). Framing the black experience: A discourse analysis of President Barack Obama's speeches. *The Journal of Pan African Studies*, 6(4), 1–17.
- Mudiawati, R. C., Hudiyono, Y., & Suhatmady, B. (2023). Analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap bahasa slogan aksi demonstrasi guru di Samarinda. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 6(3), 739–762. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v6i3.694>
- Muffidah, R., Anggraini, N., & Purawinangun, I. A. (2021). Analisis wacana kritis dimensi teks model Teun a. Van Dijk pada teks berita kelas siswa VIII SMPN 28 Kota Tangerang. *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 10(1), 33. <https://doi.org/10.31000/lgrm.v10i1.4080>
- Nicky, E., Suhendar, M., Mulyati, Y., Damayanti, V. S., & Setiabudhi, J. (2024). Manifestasi variasi pola retorika dan fungsi bahasa dalam bingkai komunikasi politik: Studi kasus praktik retorika anggota DPD RI. *Jurnal Komunikasi Politik*, 13(2), 442–456.
- Noverino, R. (2015). Kajian analisis wacana kritis intertekstualitas (interdiskursivitas) pada terjemahan yang menggunakan bahasa gaul. *Prosiding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil)*, 6, 108–116.
- Prabowo, M. (2022). *Negosiasi makna dalam pidato politik*. Airlangga University Press.
- Rahman, A. (2024). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Saba Jaya Publiser.
- Rampton, B. (2023). *Superdiversity and sociolinguistics*.
- Rohana, & Syamsuddin. (2015). *Buku analisis wacana*.
- Samsuri, A., Mulawarman, W. G., & Hudiyono, Y. (2022). Ideologi penggunaan istilah-istilah COVID-19 di berita online: Analisis wacana kritis model Norman Fairclough. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(3), 603–618. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i3.442>
- Sari, N. N. (2020). *Konstruksi identitas kolektif pada gerakan Aksi Kamisan*. [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Susilo, D. (2020). *Wacana politik dan ideologi*. Pustaka Pelajar.
- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する 共分散構造分析title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Wahyudi, M. I. (2021). Sunan Giri dalam legitimasi kekuasaan Mataram pada *Babad Tanah Jawi*. *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara*, 12(2), 199–214. <https://doi.org/10.37014/jumantara.v12i2.1346>
- Wu, Y., Li, L., Yu, Q., Gan, J., & Zhang, Y. (2023). Strategies for reducing polarization in social networks. *Chaos, Solitons and Fractals*, 167, 113095. <https://doi.org/10.1016/j.chaos.2022.113095>



Open Access This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under a CC BY-SA 4.0 license. The images or other third-party material in this work are included under the Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material.